

ABSTRACT

The Merdeka Belajar initiative is transforming education in Indonesia, including at the higher education level through the Kampus Merdeka program, which aims to provide opportunities for students to learn outside their study programs. As one of the commonly implemented learning programs by universities in Indonesia, internships or work practices in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy have undergone significant changes regarding the meaning of credit hours. Its transition from study hours to activity hours requires universities to make adjustments, as done by X University, a state university in West Java, to ensure that students' learning outcomes are still met. This research reviews the alignment between the concepts promoted by the government and the implementation of the internship program based on the philosophical framework of educational curriculum in five aspects: balance, breadth and depth, coherence, continuity, and progressivity in students' learning process. This research explores the implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka through a qualitative study using secondary data exploration and interviews with students and lecturers. Findings indicate a misalignment between policy implementation and the balance aspect of educational curriculum philosophy. However, the lecturers were able to adapt to ensure that the credit hours align with the competencies that students should possess.

Keywords: *internship; Merdeka Belajar Kampus Merdeka; credit hours; philosophical review*

ABSTRAK

Pendidikan di Indonesia mengalami transformasi melalui konsep Merdeka Belajar. Pada tingkat perguruan tinggi, konsep tersebut melahirkan program Kampus Merdeka yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Sebagai salah satu program belajar yang telah umum diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia, magang atau praktik kerja dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengalami perubahan signifikan pada jumlah satuan kredit semester. Transisi pemaknaan satuan kredit semester dari jam belajar menjadi jam kegiatan mengharuskan kampus melakukan penyesuaian agar capaian pembelajaran mahasiswa tetap terpenuhi. Melalui penelitian ini, kesesuaian antara konsep yang diusung pemerintah dengan implementasi program magang akan ditinjau berdasarkan kerangka filosofis kurikulum pendidikan dari lima aspek, yakni keseimbangan, kedalaman dan keluasan, keutuhan, keberlanjutan, serta progresivitas dalam proses belajar peserta didik. Data yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada kasus ini didapatkan melalui eksplorasi data sekunder dan wawancara dengan mahasiswa serta dosen Perguruan Tinggi X, sebuah perguruan tinggi di Jawa Barat. Studi kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara implementasi kebijakan dengan filosofi kurikulum dari segi keseimbangan. Namun, pihak dosen mampu melakukan adaptasi untuk memenuhi kesesuaian bobot satuan kredit semester dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki mahasiswa.

Kata kunci: *magang; Merdeka Belajar Kampus Merdeka; satuan kredit semester; tinjauan filosofis*

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya perubahan teknologi dan penyebaran informasi secara masif di abad ke-21, pendidikan diharapkan menjadi sarana untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu menguasai berbagai keterampilan dan menjadi pembelajar yang kompeten. Dalam rangka menunjang hal tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengarahkan agar dalam lima tahun ke depan, perguruan tinggi memiliki prioritas utama untuk menciptakan sumber daya manusia unggul sebagai pemimpin masa depan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (2020), disebutkan secara rinci terkait bentuk pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi yang dapat terhitung ke dalam beban satuan kredit semester (sks). Konsep pendidikan di perguruan tinggi yang sedang mengalami transformasi tersebut diwujudkan dalam program yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sebagai bagian dari semangat Merdeka Belajar di jenjang pendidikan tinggi, MBKM hadir untuk memberikan nilai tambah berupa pengalaman, keterampilan hidup (*life skills*), keterampilan untuk bekerja (*transferable skills*), serta relasi (*networking*) bagi para mahasiswa yang mengikuti program. Sebagaimana yang tercantum dalam situs resmi MBKM, upaya untuk menghasilkan lulusan yang tangguh serta memiliki kompetensi unggul dan relevan dengan zaman dapat dicapai melalui peningkatan pengalaman belajar setiap mahasiswa sesuai dengan minat dan cita-citanya. Eskalasi pengalaman belajar tersebut tidak hanya dapat dijumpai di luar ruang kelas seperti perpustakaan dan laboratorium, melainkan bisa didapatkan juga melalui tempat praktik kerja, tempat pengabdian, ataupun pusat riset yang dilakukan bersama dengan masyarakat.

Berdasarkan *Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri* (2020), MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar mahasiswa lebih siap dan

relevan dengan kebutuhan zaman dan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Tujuan tersebut disetujui oleh para mahasiswa. Lebih dari 50% mahasiswa menilai bahwa MBKM memberikan manfaat yang luas khususnya pada peningkatan *soft skills* dan berguna bagi bekal bekerja setelah lulus (Chelsya & Wirianata, 2022; Laga dkk., 2021).

Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri juga menyatakan bahwa melalui program MBKM, hak belajar tiga semester di luar program studi dilaksanakan melalui program-program pembelajaran berdasarkan pengalaman (*experiential learning*) dengan opsi yang fleksibel. Mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan pembelajaran selama maksimal 1 semester di program studi lain dalam perguruan tinggi yang menaunginya dan 2 semester di luar perguruan tingginya sesuai prosedur pendaftaran yang ada. Terdapat delapan bentuk kegiatan pembelajaran dalam program MBKM yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yakni magang/praktik kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, membangun desa, dan pertukaran pelajar (Gambar 1). Dengan bentuk pembelajaran yang beragam, mahasiswa diharapkan bisa mengembangkan potensi yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Sebelum ada program MBKM, sejumlah perguruan tinggi juga menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih oleh para mahasiswa, seperti praktik kerja/magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), pertukaran pelajar, dan penelitian. Namun, program-program tersebut sebelumnya merupakan bagian dari fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa sebagai pemenuhan kurikulum program studi dengan sks yang tidak besar ataupun tidak terhitung sebagai sks sama sekali. Berbeda dengan kebijakan yang ditetapkan pada pelaksanaan MBKM, setiap perguruan tinggi mendapatkan arahan agar kegiatan belajar yang diikuti mahasiswa pada program MBKM dapat dikonversi ke dalam bobot 20 sks.



Gambar 1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran dalam MBKM

Sumber: *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka* (1st ed.) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, 2020

Perubahan signifikan dalam hal perhitungan besaran mata kuliah (sks) ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian pelaksanaan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Berdasarkan tinjauan filosofis menurut David Carr (2005), beban sks merupakan salah satu sebab tidak tercapainya aspek keseimbangan dalam pendidikan. Kurikulum yang seimbang seharusnya memiliki sks yang sesuai dengan waktu dan beban pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditargetkan.

Tinjauan mengenai transformasi pendidikan Indonesia berdasarkan sudut pandang filosofi pendidikan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut baru dikhususkan pada program MBKM dan konsep Merdeka Belajar secara luas. Sebagai contoh, analisis terhadap MBKM dilakukan menggunakan pendekatan filsafat humanisme. Menurut Susilawati (2021), MBKM dapat dimaknai sebagai manifestasi pandangan filsafat pendidikan humanisme karena telah menjadi program yang dapat memberikan kesempatan mahasiswa untuk memilih

wadah pembelajaran sesuai minatnya. Aliran filsafat humanisme menekankan bahwa pembelajaran bertumpu pada proses kognitif dan afektif yang sesuai dengan kapabilitas dan potensi mahasiswa. Dengan demikian, peserta didik akan mencapai kualitas belajar dan kebermaknaan belajar secara mandiri. Adapun analisis terhadap konsep Merdeka Belajar dilakukan menggunakan pendekatan lain, seperti filsafat Ki Hadjar Dewantara dan filsafat pendidikan progresivisme John Dewey.

Berdasarkan pandangan filsafat Ki Hajar Dewantara, aspek pengembangan karakter dan keterampilan kini lebih diutamakan daripada pengetahuan semata (Ainia, 2020). Aspek yang diutamakan tersebut tergambar dari bagaimana kurikulum yang disusun dapat mengimplementasikan nilai-nilai karakter bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berdasarkan filsafat pendidikan progresivisme John Dewey, konsep Merdeka Belajar dicirikan dengan adanya penekanan pada keleluasaan lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi kemampuan, kecerdasan, dan potensi peserta didik secara fleksibel dan demokratis (Mustaghfiroh, 2020).

Dengan demikian, tinjauan keberlangsungan MBKM secara filosofis masih terbatas. Belum ada penelitian yang spesifik pada suatu kegiatan MBKM sebagai sarana untuk mengevaluasi program yang ada secara khusus. Padahal filsafat pendidikan merupakan pandangan dasar yang dapat menjadi pedoman bagi para pihak dalam pendidikan untuk merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan (Susilawati, 2021).

Evaluasi pelaksanaan MBKM dengan pendekatan filsafat pendidikan dalam penelitian ini secara khusus akan melihat studi kasus pada perubahan beban sks program magang. Permasalahan mengenai beban sks yang mengalami peningkatan secara signifikan terkandung dalam indikator peninjauan kurikulum yang dikemukakan oleh salah satu filsuf modern bernama David Carr. Menurut Carr (2005), kurikulum yang baik harus memenuhi 5 aspek, yaitu keseimbangan, kedalaman dan keluasan, kebutuhan, keberlanjutan, serta progresivitas.

Pertama, aspek keseimbangan menekankan bahwa kurikulum pendidikan harus dapat dilihat dan dinilai tidak hanya berdasarkan capaian kognitif saja, melainkan juga dari sisi sosial dan psikomotorik peserta didik. Tidak hanya dalam hal capaian pembelajaran, keseimbangan juga dapat ditinjau dari segi beban yang diterima peserta didik dalam hal jumlah sks dengan jam belajar. Aspek kedua adalah “kedalaman dan keluasan pembelajaran” yang didapatkan peserta didik. Selanjutnya adalah aspek “keutuhan” pembelajaran. Tingkat keutuhan kurikulum dapat diupayakan melalui integrasi antarmata kuliah ataupun antarmodel pembelajaran yang diperoleh peserta didik. Aspek keempat adalah keberlanjutan. Kurikulum yang baik akan memberikan pembelajaran secara bertahap dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Aspek terakhir adalah progresivitas. Sebuah kurikulum yang progresif diwujudkan dengan pembelajaran yang mengalami kemajuan dari tingkat pendidikan sebelumnya. Kelima aspek tersebut perlu menjadi acuan secara komprehensif dalam penyusunan kurikulum agar sejalan dengan tingkat perkembangan kognitif, sosial, dan psikomotorik peserta didik.

Salah satu perguruan tinggi yang turut aktif menyelenggarakan program pembelajaran di luar kelas sebelum adanya MBKM adalah Perguruan Tinggi (PT) X, sebuah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum di Jawa Barat. Sebelum adanya kebijakan Kampus Merdeka, para mahasiswa PT X telah mendapatkan kesempatan untuk memilih beragam bentuk pengalaman belajar dan mengasah kompetensi, seperti magang, lomba Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM), Kuliah Kerja Nyata – Tematik (KKN-T), riset, dan pertukaran pelajar. Program pembelajaran yang didukung dan dinaungi oleh PT X ditujukan bagi para mahasiswa agar dapat mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakatnya, terutama kepada mahasiswa sarjana, yang menurut situs resmi PT X, berjumlah lebih dari 4.000 per tahunnya.

Ketika program MBKM ditetapkan oleh pemerintah, PT X mulai melakukan penyesuaian dalam aspek sistem yang

disediakan dan program-program pembelajaran luar kelas yang dapat dihitung sebagai kegiatan MBKM. Bentuk penyesuaian yang cukup signifikan ada pada konversi jumlah satuan kredit semester (sks), khususnya mata kuliah Kerja Praktik (KP). PT X sebelumnya hanya menghitung aktivitas pembelajaran magang yang dapat diambil oleh mahasiswa saat semester 6 atau 7 sebesar 2-3 sks dengan status sebagai mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum program studi. Akan tetapi, kini PT X harus melakukan penyesuaian beban sks bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang menjadi 20 sks.

Berdasarkan studi kasus PT X sebagai salah satu perguruan tinggi yang melakukan penyesuaian sks pada pelaksanaan kegiatan magang, implementasi dari kurikulum MBKM perlu segera ditelaah agar dapat diperoleh data lapangan mengenai hal yang perlu dipertahankan dan diperbaiki ke depannya. Telaah terhadap Merdeka Belajar secara umum dibatasi pada tahap perencanaan dan aturan yang berlaku di dalam PT X. Kemudian penelitian ini secara khusus meninjau pelaksanaan MBKM dengan studi kasus kegiatan magang. Cakupan telaah pada program MBKM kegiatan magang dipilih karena besarnya angka minat dan partisipasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut (Chelsya & Wirianata, 2022; Laga dkk., 2021).

Menurut situs resmi Kemendikbudristek, jumlah peserta kegiatan magang dan studi independen bersertifikat terus mengalami peningkatan. Begitu juga dengan PT X yang memiliki 45 dari 50 program studi yang mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah Kerja Praktik atau magang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep MBKM yang diusung pemerintah dan teknis pelaksanaan yang terealisasi di PT X menggunakan kerangka filosofis kurikulum pendidikan yang dikemukakan oleh David Carr, khususnya pada program magang dalam MBKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan

pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi program MBKM, mulai dari perencanaan dari pihak perguruan tinggi hingga pelaksanaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Studi ini dilakukan dengan mengambil kasus di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Penentuan universitas dan informan dosen serta mahasiswa dilakukan secara purposif (*purposive sampling*). Metode pemilihan partisipan tersebut dimulai dengan menentukan identitas khusus yang sesuai dengan tujuan riset (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada pelaksanaan program magang/Kerja Praktik (KP) untuk melihat penerapan MBKM di PT X secara mendalam dan kontekstual. Adapun pengolahan data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk naratif. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan pengalaman secara rinci dari individu dengan konteks tempat dan waktu yang spesifik (Creswell & Poth, 2018). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan terhadap pengalaman dari mahasiswa dan dosen dalam perencanaan dan pelaksanaan program magang pada MBKM.

Secara rinci, penelitian ini melalui beberapa proses untuk mencapai tujuan penelitian. Pada tahap pertama, terlebih dahulu dilakukan studi pendahuluan dengan mengumpulkan informasi data sekunder dari sumber yang relevan untuk memahami standar pelaksanaan program MBKM dari pemerintah dan PT X. Tahap kedua adalah pengambilan data primer dengan metode wawancara semi terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi dinamika yang terjadi pada pelaksanaan MBKM secara mendalam. Tahapan wawancara ini memiliki *output* berupa informasi mengenai proses implementasi kurikulum MBKM di PT X khususnya pada salah satu program studi, kendala yang muncul, hingga tanggapan informan terhadap program yang diselenggarakan. Kemudian dari data yang terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan cara meninjau kesesuaian antara rencana dan realita pelaksanaan program menggunakan teori kurikulum David Carr (2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelaksanaan MBKM di PT X

Sejak program MBKM disahkan oleh Kemendikbudristek, mahasiswa PT X dapat mulai mengikutinya pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau terhitung bulan Januari 2021. Secara keseluruhan, perancangan program diatur oleh Tim Ad Hoc MBKM di Direktorat Pendidikan PT X. Adapun dari segi pelaksanaan kurikulum, pihak program studi memiliki peran yang lebih besar untuk memastikan mahasiswa bisa mengikuti program MBKM dengan tetap memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari masing-masing program studi. Secara umum, terdapat 8 jenis kegiatan MBKM yang diselenggarakan sesuai kebijakan yang ditetapkan Kemendikbudristek, namun PT X memiliki banyak opsi untuk masing-masing jenis (Tabel 1). Berdasarkan webinar sosialisasi Seputar Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh 4 dosen PT X, disebutkan bahwa semua kegiatan disetarakan dengan kuliah secara *in-curriculum* ataupun *beyond curriculum*. *In-curriculum* artinya MBKM yang diikuti mahasiswa dapat menggantikan kurikulum yang ada di mata kuliah, dengan beban yang tergantung pada kecocokan dengan mata kuliah terdaftar. Sedangkan *beyond curriculum* mengindikasikan bahwa program yang dipilih mahasiswa akan masuk ke dalam sks mata kuliah pilihan di luar program studi. Mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti lebih dari 1 kegiatan MBKM, dan setiap kegiatan yang diikuti sebanding dengan 1 mata kuliah. Program tidak hanya dijalankan dalam 1-2 bulan, tetapi sekaligus hingga 1 semester agar mahasiswa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Total beban MBKM yang telah diikuti mahasiswa sangat diharapkan setara minimal 20 sks pada saat lulus. Hal ini dengan harapan mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman yang *worthwhile* dari segi bobot, dan perguruan tinggi bisa mendapatkan poin atau pengakuan dari pemerintah sebagaimana tercantum dalam *Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri*. Dengan kata lain, partisipasi mahasiswa dalam MBKM akan menjadi prestasi bagi perguruan tinggi.

Tabel 1 Penyelenggaraan Program Pembelajaran Perguruan Tinggi X dalam Kegiatan MBKM

Jenis Kegiatan MBKM	Program di Perguruan Tinggi X	Sifat Kegiatan
Pertukaran pelajar	<ul style="list-style-type: none"> ● Kerja sama PT ● Pertukaran Mahasiswa Merdeka ● Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) ● International Networks - Outbound Semester Exchange (OSE) Program 	Kurikuler
magang/ praktik kerja	<ul style="list-style-type: none"> ● Kampus Merdeka Bank Indonesia ● Summer School - International Virtual Course ● Mitra industri dan dunia kerja lain 	Ko-kurikuler
Asistensi mengajar di satuan pendidikan	Kampus Mengajar	Ekstra-kurikuler
Riset/ penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ● Kerja sama LPPM PT ● Riset 	Ko-kurikuler
Proyek kemanusiaan	Proyek Kemanusiaan	Ekstra-kurikuler
Kegiatan wirausaha	Kegiatan Wirausaha	Ekstra-kurikuler
Studi/proyek independen	<ul style="list-style-type: none"> ● Google Bangkit ● Sekolah Ekspor ● IVC ● Kompetisi nasional dan internasional 	Ko-kurikuler
Membangun desa/ KKN	Kuliah Kerja Nyata - Tematik	Ko-kurikuler

Sumber: MBKM Talks: Seputar Merdeka Belajar Kampus Merdeka PT X dari Youtube Direktorat Pendidikan PT X, 2021

Berdasarkan telaah filosofi pendidikan dari David Carr (2005), peneliti melihat bahwa kebijakan kurikulum MBKM memiliki konsep yang mampu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran yang luas dan sekaligus mendalam. Dengan memiliki kesempatan lebih untuk belajar di luar daftar mata kuliah reguler sesuai program studi, kurikulum dengan pembelajaran yang luas bisa dinikmati oleh mahasiswa karena dipilih berdasarkan minat. Termasuk juga ketika mahasiswa mengambil MBKM magang, pembelajaran yang mendalam juga bisa didapatkan dari instansi kerja yang sejalan dengan program studi mahasiswa tersebut.

Proses Perencanaan

Dalam menyikapi kebijakan Kurikulum MBKM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak tahun 2020, Direktorat Pendidikan PT X mengakomodir kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan paradigma pendidikan perguruan tinggi sebagai landasan pelaksanaan pendidikan. Sejak tahun 2012, Senat Akademik telah menetapkan 4 paradigma sebagai landasan pengembangan kurikulum yang dipegang oleh perguruan tinggi. Adapun paradigma tersebut adalah paradigma akreditasi internasional (*International accreditation and benchmarking*) sebagai muara dari 3 paradigma lainnya: *Outcome based education* (OBE), *Continuous improvement*, dan *Learner centered education*. Berdasarkan paradigma pendidikan tersebut, disusunlah norma penyelenggaraan MBKM sebagai prinsip bagi setiap *stakeholder* PT X, mulai dari rektor hingga jajaran civitas akademika, untuk melaksanakan program yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Secara menyeluruh, kurikulum di PT X baru saja berubah pada tahun 2019, sesuai dengan waktu pengembangan kurikulum yang telah dijadwalkan setiap 5 tahun sekali. Kehadiran Kurikulum MBKM membuat PT X mengambil kebijakan untuk tidak merombak kurikulum secara keseluruhan, tetapi hanya mengadakan proses penyesuaian (*adjustment*) pada mata kuliah yang diambil

oleh mahasiswa ketika memilih program MBKM tertentu. Dengan begitu, kegiatan belajar di luar perguruan tinggi bisa dihitung sebagai kegiatan yang memenuhi capaian pembelajaran. Secara lebih teknis, PT X menyerahkan proses pelaksanaan Kurikulum MBKM kepada dosen dari setiap program studi, namun tetap berlandaskan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah disusun oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, aturan administrasi akademik, hingga konversi jam kegiatan MBKM ke dalam susunan sks mata kuliah program studi. Selain menggunakan SOP dari WRAM, program studi juga menggunakan panduan rektor dan arahan normatif dari Senat Akademik agar bisa menjamin kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa tetap memenuhi capaian pembelajaran (*students outcome*) sesuai masing-masing program studi. Berdasarkan informasi mengenai proses perencanaan Kurikulum MBKM di PT X, dapat dilakukan tinjauan untuk menilai koherensi atau keutuhan dan progresivitas kurikulum yang ideal. Walau beban yang dimiliki oleh *stakeholder* yang terlibat belum dapat dikatakan menjaga prinsip keadilan dan kebebasan karena adanya regulasi yang ditetapkan satu arah dari Direktorat Pendidikan PT X, tetapi esensi dari sistem pelaksanaan yang diterapkan oleh PT X dalam rangka mengadopsi program MBKM bisa dikatakan menjunjung nilai keutuhan, kontinuitas, dan progresivitas dari sebuah kurikulum. Hal ini karena PT X memiliki paradigma pendidikan sebagai koridor dalam penetapan kebijakan kurikulum yang dilaksanakan. Dengan paradigma ini, perguruan tinggi memiliki landasan yang kuat untuk mengejar keutuhan kurikulum yang fokus pada "*outcome based education*" (OBE) dan "*learner centered education*". Kurikulum yang utuh dapat terwujud dengan konsep pendidikan progresivisme yang mengutamakan *student-centered*, dibanding jika menggunakan konsep tradisionalisme yang lebih *subject-centered*. Kesempatan mahasiswa untuk dapat memilih mata kuliah sesuai minat merupakan bentuk kebijakan *student-centered*. Selanjutnya, mata kuliah yang dipilih mahasiswa juga

akan dievaluasi oleh dosen pembimbing agar mata kuliah yang diambil berada dalam koridor CPL. Selain itu, dalam menerapkan kebijakan kurikulum yang baru, PT X juga dapat dikatakan menjalankan misi kurikulum yang kontinu (berkelanjutan) dan progresif berdasarkan paradigma pendidikan "*continuous improvement*".

Berdasarkan tinjauan yang telah dijabarkan, kurikulum yang disusun Direktorat Pendidikan PT X memenuhi 3 dari 5 poin konsep kurikulum menurut David Carr. Selanjutnya, tinjauan dilakukan berdasarkan sudut pandang para dosen di program studi sebagai pembina mahasiswa dan pengawal pelaksanaan MBKM magang oleh mahasiswa.

Proses Implementasi Kurikulum

Berdasarkan norma penyelenggaraan program MBKM dari Senat Akademik, PT X memegang pemahaman bahwa "MBKM adalah pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih proses pembelajaran, dan kepada institusi perguruan tinggi untuk mengembangkan aturan dan program terkait kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi". Dalam pelaksanaannya, program studi terlibat dalam memilih dan memutuskan program MBKM yang bisa diikuti mahasiswa, termasuk mengetahui bagaimana kualitas kegiatannya. CPL berupa kemampuan seputar ilmu pengetahuan dan *soft skills* dari masing-masing program studi menjadi acuan dalam pemberian izin bagi mahasiswa ketika memilih program MBKM. Acuan tersebut sejalan dengan dua dari empat hal penting dalam implementasi MBKM, yakni fokus pada pencapaian SKL/CPL dan pengalaman belajar dari program MBKM harus gayut sebagai kompetensi tambahan yang menunjang CPL program studi (Junaidi et al., 2020).

Program studi selaku pemilik kurikulum dan pemberi persetujuan akan menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan monitoring dan penilaian terhadap kegiatan yang diikuti mahasiswa sehingga dapat diakui sebagai mata kuliah sesuai kurikulum program studi. Persetujuan dan besaran sks konversi ditentukan sebelum mahasiswa mendaftar dan mengikuti program.

Berdasarkan arahan Senat Akademik, kegiatan MBKM tidak boleh mengurangi CPL yang sudah dirancang, maka program studi harus memetakan jam kegiatan terhadap sks dan materinya terhadap capaian pembelajaran dan juga menentukan siapa dosen pembimbing mahasiswa selama mengikuti program MBKM.

MBKM merupakan bentuk kebebasan bagi mahasiswa untuk bereksplorasi sekaligus dihargai waktu dan usahanya dalam kegiatan belajar di luar kelas melalui pemenuhan sejumlah sks. Ketika mahasiswa hendak memilih program MBKM, masing-masing program studi akan memastikan mata kuliah konversi yang akan diambil mahasiswa untuk bisa disetarakan dengan kegiatan MBKM. Kegiatan tidak harus dimulai ketika awal semester, sesuai dengan durasi keberlangsungan program, dan telah dalam sepengetahuan dosen di program studi. Kebijakan ini diberikan sebagai upaya untuk mendorong mahasiswa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Setelah mahasiswa terdaftar dalam satu kegiatan MBKM, nantinya program studi akan melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), sebagaimana hasil pencapaian mahasiswa dilaporkan secara berjenjang setiap semester.

Pada proses implementasi kurikulum, beban administrasi dipandang menjadi salah satu “pekerjaan rumah” yang perlu dicari solusinya agar terdapat sistem yang lebih efektif dan efisien. Hal lain yang menjadi perhatian dosen yaitu terkait beban minimal 20 sks yang harus dipenuhi mahasiswa ketika mengikuti program MBKM. Besaran sks tersebut merupakan kebijakan yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dengan konversi 1 sks = 45.3 jam berdasarkan SN-Dikti. Masih adanya kendala penyetaraan mata kuliah yang harus dikonversi selama belajar 3 semester, serta sulitnya pemenuhan beban dengan minimal 20 sks untuk satu jenis kegiatan belajar di luar program studi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas aturan administrasi MBKM dalam mencapai tujuan program.

Jika meninjau dari kriteria kurikulum ideal yang harus berimbang, maka beban sks dan durasi program yang diikuti perlu dipastikan

kembali kesesuaiannya. Kurikulum dapat dikatakan berimbang jika aturan dalam kurikulum yang ditetapkan dapat secara objektif dilandaskan berdasarkan kebutuhan mahasiswa sebagai seorang manusia dan sebagai bagian dari program studi yang harus memenuhi CPL. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait pengakuan beban sks tersebut.

Dinamika Pelaksanaan

Pada dasarnya, Fakultas Teknik di Perguruan Tinggi X memiliki mata kuliah wajib berupa Kerja Praktik (KP) dengan beban 2-4 sks. Pelaksanaan magang biasanya berlangsung kurang lebih selama 3 bulan dan dilakukan saat libur semester genap, sehingga mata kuliah dalam kelas tidak akan terganggu dengan kegiatan magang. Namun, adanya penyelenggaraan MBKM dengan salah satu pilihan program magang, maka mahasiswa yang mengambil mata kuliah KP dapat sekaligus memenuhi 20 sks dengan durasi kerja ideal selama 6 bulan. Status mendapatkan 20 sks tersebut diatur oleh dosen atas sepengetahuan Ketua Program Studi dalam bentuk konversi ke mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan yang terdapat dalam kurikulum program studi berdasarkan tugas yang akan diemban mahasiswa ketika mengikuti magang. Perbedaan lain dari kebijakan sebelumnya, lokasi KP dalam program MBKM tidak bisa dipilih secara bebas oleh mahasiswa. Namun, ketentuan ini tidak menjadi masalah bagi informan selaku peserta MBKM, karena mata kuliah KP sifatnya wajib dan adanya *benefit* konversi maksimal 20 sks serta uang saku setiap bulan selama program.

Adapun dari segi persiapan, sebagai peserta MBKM magang, mahasiswa bersama seluruh teman seangkatannya yang mengambil mata kuliah KP ditawarkan oleh Ketua Program Studi secara langsung untuk hanya mengambil program MBKM tersebut. Selanjutnya, mahasiswa diberikan sosialisasi terkait tujuan dan manfaat dari mengikuti MBKM program magang. Mahasiswa juga diminta untuk mengisi angket profil diri dan preferensi terkait KP yang hendak diikuti, transkrip nilai, bentuk kegiatan magang

(*online/on site*), dan prioritas wilayah. Angket tersebut diberikan sebagai landasan pertimbangan industri yang dipilihkan untuk KP mahasiswa. Setelah proses persiapan selesai, mahasiswa menunggu hasil keputusan mengenai industri atau instansi yang menjadi tempat mereka melaksanakan KP.

Adaptasi Dosen dan Mahasiswa Prodi X

Pada praktiknya, mahasiswa melaksanakan magang hanya selama 3 bulan. Hal tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi antara pihak program studi dengan industri. Menurut pihak mitra, mereka hanya mengarahkan mahasiswa sesuai dengan tugas yang telah disiapkan. Oleh karena itu, ketika 3 bulan tugas kerja sudah selesai dan mahasiswa bisa mempresentasikan hasil kerja, maka kegiatan dikatakan telah tuntas. Dengan kondisi di luar kendali tersebut, pihak program studi tidak begitu saja melepas tanggung jawab terhadap mahasiswa karena adanya porsi sks yang besar dan juga terkait dengan kebutuhan pemenuhan profil lulusan.

Setelah jadwal libur semester berakhir dan mahasiswa selesai mengikuti magang, aktivitas yang telah diikuti dalam program magang dilaporkan kepada dosen pembimbing menggunakan *log book*. Kemudian pihak program studi memastikan kesesuaian antara magang yang telah diikuti mahasiswa dengan mata kuliah-mata kuliah konversi. Jika ada pembelajaran yang tidak didapatkan di industri yang didatangi, maka mahasiswa hanya mendapatkan konversi kurang dari 20 sks. Selain itu, karena pelaksanaan magang hanya berlangsung selama 3 bulan, pihak program studi membuka kelas tambahan untuk setiap mata kuliah konversi dengan melakukan penyesuaian dari segi materi dan metode dari pembelajaran serta asesmen sehingga lebih berhubungan dengan aktivitas KP. Pada akhirnya, kegiatan magang yang diikuti narasumber dapat dikonversi menjadi 18 sks, terdiri atas 16 sks dari beberapa mata kuliah yang sejalan dengan kegiatan magang dan 2 sks dari mata kuliah wajib Praktik Kerja.

Pada dasarnya, perencanaan yang telah

disusun sedemikian matang sangat mungkin menimbulkan polemik jika kegiatan tidak disosialisasikan secara merata kepada industri atau perusahaan yang menjadi mitra kerja sama. Dalam hal ini, pihak mitra tidak mengetahui teknis pelaksanaan program MBKM sesuai aturan yang ada, namun mahasiswa juga tidak dapat mengubah kondisi dari miskomunikasi tersebut. Selama kegiatan magang, pihak mitra hanya fokus untuk membahas terkait deskripsi kerja dan progres pekerjaan yang telah dilakukan oleh peserta magang.

Berdasarkan hasil tinjauan literatur, kondisi kesalahpahaman antara pihak perguruan tinggi dengan mitra juga terjadi di perguruan tinggi lain. Menurut Aryana (2022), inkonsistensi arahan dari program yang masih baru ini menunjukkan masih adanya ketidaksiapan penerapan. Ke depannya, masih diperlukan beragam upaya yang mendukung penerapan kebijakan MBKM, seperti ketersediaan sumber daya, arahan yang menjadi kebijakan, motivasi dari para mahasiswa, serta sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh universitas bersama mitra yang sudah paham terhadap kebijakan. Menelaah lebih lanjut pelaksanaan program MBKM di Prodi X, dosen sebagai pengawas dan penanggung jawab pendidikan bagi mahasiswa telah berhasil memberikan alternatif pembelajaran dengan tetap mengadakan kelas. Berdasarkan tinjauan filosofis sebuah kurikulum, upaya yang dilakukan oleh Prodi X menunjukkan penerapan prinsip terkait pembelajaran yang utuh. Walau tidak bisa mendapatkan pengalaman magang secara kuantitatif selama 1 semester, tetapi konten dan pengalaman belajar yang diterima mahasiswa telah sesuai dengan bobot sks yang diterimanya melalui bentuk pembelajaran di kelas. Kondisi ini secara filosofis menunjukkan adanya aspek keseimbangan besar sks dengan proses belajar mahasiswa.

Terlepas dari kebijakan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di luar program studi, pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dengan menyesuaikan pengalaman mahasiswa ketika KP merupakan upaya yang bertanggung jawab dari Prodi X untuk dapat memenuhi CPL Prodi. Pada akhirnya, sebagaimana

dinyatakan oleh Susetyo (2020), program MBKM telah memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi *stakeholder* perguruan tinggi untuk mengembangkan kapasitas, kreativitas, kebutuhan, serta kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Upaya penerapan Kurikulum Merdeka sudah dilakukan oleh Perguruan Tinggi X dengan menyusun sistem MBKM yang terarah untuk bisa diikuti oleh para dosen dan mahasiswa di masing-masing program studi. Walau PT X menetapkan kurikulum baru di tahun 2019, perguruan tinggi tetap memegang prinsip penyesuaian kurikulum yang mengacu pada *International accreditation and benchmarking, Outcome based education (OBE), Continuous improvement, dan Learner centered education*, sehingga kurikulum yang berlaku dapat menyesuaikan dengan kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek. Bentuk kebijakan ini secara filosofis menunjukkan adanya prinsip kemerdekaan atau kebebasan pada pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Adapun dari segi pelaksanaan, masih banyak ditemukan penyesuaian yang dilakukan oleh Prodi X sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL dan dengan mitra untuk memastikan kegiatan magang/ Kerja Praktik yang diikuti mahasiswa dapat berjalan baik. Meskipun dalam pelaksanaan MBKM banyak kendala yang muncul, namun prinsip kurikulum yang ideal tetap dapat dipertahankan, yakni dari segi kedalaman dan keluasan, keutuhan, kontinuitas, dan progresivitas melalui kegiatan belajar di luar program studi. Namun, aspek keseimbangan dari penerapan kebijakan MBKM melalui program magang masih perlu dipastikan, terutama oleh pemerintah, karena jumlah beban sks yang harus ditanggung mahasiswa dianggap terlalu besar. Pelaksanaan MBKM magang yang diikuti oleh mahasiswa Prodi X menunjukkan bahwa program 3 bulan sudah cukup dalam melaksanakan Kerja Praktik, namun syarat MBKM mengharuskan program diikuti selama 6 bulan. Walaupun adanya ketidaksesuaian rencana dengan

realita yang terjadi, pihak Prodi X akhirnya melakukan alternatif lain agar capaian pembelajaran mahasiswa dapat terpenuhi, yaitu dengan mengadakan kelas tambahan selama 1 semester dan mengaitkan materi pembelajaran dengan pelaksanaan magang.

Atas dasar tinjauan dan simpulan yang ada, peneliti memberikan saran kepada dua pihak, yakni untuk perguruan tinggi dan pembuat kebijakan. Bagi perguruan tinggi khususnya Prodi X, sistem alternatif pembelajaran MBKM yang telah mengutamakan tujuan pembelajaran atau CPL perlu untuk dibagikan kepada universitas lain sehingga tujuan dari MBKM yang bermanfaat bagi mahasiswa (*student-centered*) dapat dirasakan lebih merata oleh setiap instansi pendidikan. Kemudian untuk pihak pembuat kebijakan, aturan dalam MBKM perlu ditinjau lebih lanjut dari segi keseimbangannya terkait jumlah sks yang harus diambil dan durasi program yang diikuti mahasiswa.

PUSTAKA ACUAN

- Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525>
- Aryana, D. (2022). *Evaluasi penerapan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia* [Thesis S1 Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu/id/eprint/76653>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (n.d). *Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri*. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf>
- Carr, D. (2005). *Making sense of education: An introduction to the philosophy and theory of education and teaching*. Routledge.
- Chelsya, & Wirianata, H. (2022). Persepsi mahasiswa terhadap kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *YUME : Journal of Management*,

- 5(3), 387–401. <https://doi.org/10.37531/yume.vvix.4547>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Pendidikan ITB. (2021, July 5). *MBKM Talks: Seputar Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi Mahasiswa ITB* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UuWebXI5LZM>
- Junaidi, A., Wulandari, D., Arifin, S., Soetanto, H., Kusumawardani, S. S., Wastutiningsih, S. P., Utama, M. S., Cahyono, E., Hertono, G. F., Syam, N. M., WY, H. J., Putra, P. H., Wijayanti, C., & Jobih. (2020). Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/BUKU-PANDUAN-PENYUSUNAN-KURIKULUM-PENDIDIKAN-TINGGI-MBKM.pdf>
- Laga, Y., Nona, R. V., Langga, L., & Jamu, M. E. (2021). Persepsi mahasiswa terhadap kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 699–706. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1951>
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163703/permendikbud-no-3-tahun-2020>
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” perspektif aliran progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (n.d.). *Profil Perguruan Tinggi*. https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/QTFFOEMzNTYtNDh-FRI000DcxLUFGM0UtODUwNzk0NDN-GOTUy#sortstatus
- Situs Merdeka Belajar Kampus Merdeka - MBKM. (n.d.). *Magang*. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang/detail>
- Susetyo. (2020). Permasalahan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Prosiding Seminar Daring Nasional “Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia*, 29-43 <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/issue/view/956/>
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>

